Dr. H. Ali Hamzah, M.Ag.

**IDE TAQNÎN
IBN AL-MUQAFFA
DAN KODIFIKASI
HUKUM ISLAM
DI INDONESIA**

**IDE *TAQNÎN* IBN AL-MUQAFFA DAN KODIFIKASI
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara.

PERHATIAN

**KECELAKAAN BAGI ORANG-ORANG YANG CURANG
(QS Al-Muthaffifin Ayat 1)**

Para pembajak, penyalur, penjual, pengedar, dan **PEMBELI BUKU BAJAKAN** adalah bersekongkol dalam alam perbuatan **CURANG**. Kelompok genk ini saling membantu memberi peluang hancurnya citra bangsa, “merampas” dan “memakan” hak orang lain dengan cara yang bathil dan kotor. Kelompok “makhluk” ini semua ikut berdosa, hidup dan kehidupannya tidak akan diridhoi dan dipersempit rizkinya oleh **ALLAH SWT.**

(Pesan dari Penerbit *ALFABETA*)

Dr. H. Ali Hamzah, M.Ag.

**IDE *TAQNÎN* IBN AL-MUQAFFA DAN KODIFIKASI
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Editor:

Dr. Faizin, M. Ag

PENERBIT ALFABETA BANDUNG

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© 2018, Penerbit Alfabeta, Bandung

Judul Buku : Ide *Taqnîn* Ibn Al-Muqaffa dan Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia
Penulis : Dr. H. Ali Hamzah, M.Ag.
Editor : Dr. Faizin, M. Ag
Penerbit : **ALFABETA, CV**
Website: www.cvalfabeta.com
Email: alfabetabdg@yahoo.co.id
Telepon: 022-2008822
Faks: 022-2020373
Cetakan Kesatu : Oktober 2018
ISBN : 978-602-289-454-4

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. Al-Taubah/9: 122)

Alhamdulillah dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt., karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan buku ini, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah berhasil membangun umat dari keterlenaan di alam kebodohan menuju alam yang dihiasi akhlakul karimah dan ilmu pengetahuan, dengan bersendikan iman serta takwa.

Buku yang berjudul : **“IDE TAQNÎN IBN AL-MUQAFFA DAN KODIFIKASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA”** berasal dari disertasi penulis sebagai salah satu syarat penyelesaian S3 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dan ditulis dalam rangka meningkatkan karir sebagai Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan ilmu penulis, dan walaupun ada secercah kesempurnaan yang ditemukan dalam tulisan ini, hal itu semata karena rahmat Allah Swt. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa buku ini dapat diselesaikan berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama

sekali dari bapak-bapak promotor (pembimbing) dan pihak keluarga. Untuk itu, ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, penulis sampaikan kepada yth. Bapak Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin sebagai pembimbing I dan yth. Bapak Prof. Dr. H. Makmur Syarif, SH, M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan buku ini dari awal sampai selesai. Penulis juga berterimakasih kepada Bapak Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc, MA Rektor UIN Imam Bonjol Padang, dan Bapak Prof. Dr. H. Awis Karni, M. Ag Direktur Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada yang mulia ayahanda (alm) Mangaraja Paruhum Harahap dan ibunda (almh) Hj. Saiyah Hasibuan, karena mereka telah dengan susah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis sampai pada kehidupan seperti sekarang ini. Jasa dan kasih sayang mereka kepada penulis bagaikan lentera tak kunjung padam, ibarat sang surya menyinari bumi, ikhlas memberi tapi tak harap kembali, semoga mereka mendapatkan ampunan Allah SWT. Kepada bapak mertua (alm) Nukman Hasibuan dan ibu mertua (almh) Darisah Lubis, yang selalu memberikan nasehat kepada penulis semasa hidup mereka, semoga mereka selalu mendapat *maghfirah* dari Allah SWT., dan juga kepada teman sejawat yang telah ikut memberikan bantuan berupa dorongan dalam menyelesaikan penulisan buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta Sarbaiah Hasibuan, Am. Keb. dan anak-anak tersayang Inayah Putri Marito, Mutia Farhanah Harahap, Najwa Salsabila Harahap, dan M. Nabhan Alfarizqi Harahap. Berkat dukungan, bantuan dan kesabaran mereka, penulis berhasil menyelesaikan buku ini. Istri yang selalu setia dalam menghadapi berbagai suka-duka kehidupan ini dan anak-anakku selalu tabah dan penurut, telah memberikan dorongan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Gubernur provinsi Jambi (Zulkifli Nudin dan H. Hasan Basri Agus, MM) yang telah berkenan memberikan beasiswa kepada penulis tahun 2009, 2011 dan 2015. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak H.M. Ridha, Lc., M.A, buya Ronaldi, Lc, Sdr. Megi Vornika, M.Pd, Jokson, M.A dan teman-teman lainnya tidak disebutkan namanya satu persatu yang ikut membantu penyelesaian karya ini.

Akhirnya semoga semua bantuan yang telah diberikan, dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Swt. dan bermanfaat bagi penulis. Semoga karya ini, dapat menjadi sumbangsih penulis bagi dunia pendidikan, terutama dalam bidang Hukum Islam. Semoga Allah SWT. memberkati karya ini di kemudian hari. Amin.

Sungai Penuh, Juni 2018

P e n u l i s,

Dr. H. ALI HAMZAH

KATA SAMBUTAN
Rektor Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kerinci

Bismillâhirrahmânirrahîm

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia, inayah, dan berkah-Nya, sehingga saudara Dr. H. Ali Hamzah, M.Ag yang telah menyelesaikan menulis buku Ide *Taqnîn* Ibn Al-Muqaffa dan Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia sebagai referensi bagi mahasiswa S1 dan S2 dibidang hukum Islam, khususnya bagi yang mendalami studi biografi tokoh intelektual muslim di Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan mahasiswa Perguruan Tinggi Umum di Indonesia. Buku ini dikemas sebagai jawaban bagi kebutuhan mahasiswa untuk mengantarkan mendalami Hukum Islam, dalam ruang lingkup mengenai ide *Taqnîn* dalam sejarah hukum Islam. Selain itu mahasiswa dapat memahami dan mendalami kajian tentang kodifikasi hukum; teori tentang kepastian hukum; *taqnîn* dan relevansinya dengan kodifikasi dan kepastian hukum Islam di Indonesia.

Kami menyambut baik munculnya karya ini, mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi Civitas Akademika UIN, IAIN, STAIN dan Perguruan Tinggi Umum di Indonesia. Di samping itu juga dapat menjadi motivator bagi tenaga edukatif lainnya untuk lebih produktif menulis karya-karya ilmiah di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua. *Amin*

Sungai Penuh, Juni 2018
Rektor IAIN Kerinci

Dr. Y. SONAFIST, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KATA SAMBUTAN.....	
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
 BAB II IDE <i>TAQNÎN</i> DALAM SEJARAH HUKUM ISLAM	
A. Dinamika Perkembangan Pemikiran Ibn al-Muqaffa.....	9
1. Latar Belakang Pendidikan dan Kehidupan Ibn al-Muqaffa.....	9
2. Karya-Karya Ibn al-Muqaffa.....	13
3. Kondisi Sosial-pemerintahan, Budaya, Ekonomi dan Politik Masa Ibn al-Muqaffa	16
B. Teori-Teori Tentang <i>Taqnîn</i>	33
1. Fatwa, Fikih dan <i>Qânûn</i>	42
2. Kajian tentang <i>Qânûn</i>	46
 BAB III KAJIAN TENTANG KODIFIKASI HUKUM	
A. Pengertian Kodifikasi.....	65
B. Unsur Kodifikasi	65
C. Tujuan Kodifikasi.....	66
D. Perkembangan Sistem Hukum dalam Usaha Kodifikasi dan Perubahan Hukum.....	68
 BAB IV TEORI TENTANG KEPASTIAN HUKUM (<i>RECHTSZEKERHEIDS</i>)	
A. Pengertian dan Kegunaan Kepastian Hukum	71
B. Kepastian Hukum dan Pelaksanaan Hukum.....	95
C. Putusan Hakim Mewujudkan Kepastian Hukum	97
D. Bentuk dan Kedudukan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum di Indonesia	104

BAB V *TAQNÎN* DAN RELEVANSINYA DENGAN KODIFIKASI DAN KEPASTIAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Latar belakang lahirnya Ide Taqnîn ibn al-Muqaffa.....	117
B. Latar belakang lahirnya Kodifikasi hukum Islam di Indonesia	117
C. Sinkronisasi ide Taqnîn ibn al-Muqaffa dengan Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia	123
1. Analisis UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.....	164
2. Analisis UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.....	178
3. Analisis UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.....	225

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	299
B. Saran-Saran	300

BAB I

PENDAHULUAN

Pembentukan hukum Islam pada zaman Nabi dimotori oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Pembentukan hukum dan penegakannya didasarkan oleh wahyu dan kapasitas kenabiannya. Sumber hukum berupa wahyu Allah dan hadis Rasul, dinilai telah cukup. Hukum Islam saat itu tidak terpisahkan dari keseluruhan ajaran Islam, menyatu dalam pribadi dan perilaku Rasulullah. Masa Khulafaur Rasyidin (11-40H/632-661M) otoritas hukum masih melekat pada kekuasaan khalifah sebagai pengganti Rasul, masih memiliki peranan sebagai kepala negara juga sebagai kepala keagamaan. Dalam mengatasi berbagai problem sosial kebijaksanaan hukum khalifah menjadi kekuatan. Kodifikasi hukum belum terwujud, meskipun wahyu telah dibukukan dalam bentuk Mushaf Usmani. Al-Qur'an merupakan kodifikasi ajaran keagamaan secara utuh dibandingkan sebagai kitab hukum lainnya.

Masa kekhalifahan Bani Umayyah (41-132H/661-750M) telah terjadi pergeseran peran. Peran penguasa Umayyah, kecuali Umar bin Abdul Aziz, bukan ulama yang ahli berijtihad dan memahami agama secara mendalam. Persoalan keagamaan diserahkan kepada ulama yang tidak mempunyai kekuasaan politik, sementara urusan pemerintahan di tangan khalifah. Mulai masa ini terdapat pemisahan antara kedua kekuasaan tersebut. Pemerintah Bani Umayyah menyelenggarakan administrasi di Damaskus. Sementara ulama ahli hukum agama terpusat di Madinah. Dalam kondisi demikian, para ulama membangun kerangka hukum Islam di daerah masing-masing. Berkaitan dengan keabsahan perbuatan hukum, masyarakat memerlukan pengesahan dari khalifah, karena keputusan hukum itu bersifat mengikat. Ini bisa terjadi, karena dalam pemerintahan tidak ditemukan ulama besar, seperti ulama-ulama madzhab, karena imam-imam mazhab tidak bersedia diangkat menjadi hakim kerajaan.¹

¹Di antara fuqaha yang menolak jabatan hakim adalah Abu Hanifah, Ibn Hubairah, Muhammad ibn Abdillah yang diberi julukan *al nafs al-zakiyya*, dan Yahya ibn Abdillah. Lihat:

Ketika Ibn al-Muqaffa menjalankan tugasnya sebagai sekretaris Gubernur Kirman, ia menilai penerapan hukum sebelum dan pada masa hidupnya berada dalam kondisi yang sangat kacau (*chaos*). Salah satu faktor penyebabnya adalah karena pada waktu itu pengadilan yang ada belum memiliki kitab Undang-Undang yang mengikat di luar fikih yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, sehingga setiap hakim memutuskan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan ijtihadnya masing-masing.

Akibatnya, dalam satu wilayah peradilan yang sama, bahkan dalam satu masalah yang sama, lahir keputusan hukum yang berbeda-beda dan kontradiktif satu sama lain, tergantung pada pengadilan mana, dan siapa hakim yang menangani kasusnya serta mazhab apa yang menjadi rujukannya dalam membuat keputusan. Contohnya, antara lain, membunuh dan menodai kehormatan seseorang dianggap sebagai sesuatu yang halal (*sah-sah saja*) dilakukan di wilayah Hirah. Sementara di wilayah Kufah, kedua hal tersebut diharamkan dan pelakunya bisa dihukum berat.²

Dalam menanggapi persoalan ini, Ibn al-Muqaffa menyarankan kepada khalifah Abu Jakfar al-Manshur agar dihimpun pendapat-pendapat fikih yang relevan untuk diterapkan pada masa itu dan diberi kekuatan hukum yang mengikat berbentuk Undang-Undang resmi yang diberlakukan secara nasional dan dapat dijadikan pedoman oleh semua hakim tanpa kecuali. Dengan demikian terbentuk unifikasi hukum, sehingga tidak mungkin terjadi lagi satu masalah yang sama memiliki keputusan hukum yang berbeda-beda dan saling

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, cet. I, edisi II, hlm. 23-26

²Abd Allah ibn al-Muqaffa', *Risâlah Ibn al-Muqaffa' fî al-Sahâbah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989 M/1409 H, hlm. 8. Bandingkan dengan: Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001, cet. I, hlm. 364.

bertentangan satu sama lain, dan para hakim³ di pengadilan tidak dibenarkan memutuskan perkara dengan cara yang berbeda dari hukum yang telah dikodifikasi tersebut. Saran atau kritik itu dituangkan ibn al-Muqaffa dalam kitabnya *Risâlah al-Shahâbah* atau surat untuk para pendamping khalifah, nanti akan dijelaskan pada bab II (Dua) secara memadai.

Ibn al-Muqaffa dikenal sebagai politikus yang kritis dan cerdas dalam memperhatikan praktek hukum yang hidup dan berkembang pada zamannya. Ibn al-Muqaffa mencetuskan gagasan *taqnîn al-ahkâm* (pengUndang-Undangan hukum Islam) yang bertujuan untuk mengeliminir "kesenjangan" hukum dengan putusan hakim yang terjadi pada zamannya.

Ketika Ibn al-Muqaffa masih hidup, gagasannya yang tertuang dalam kitab *Risâlah al-Sahâbah*, tidak mendapat perhatian dari para aparat hukum ketika itu. Apalagi, akhir hayat Ibn al-Muqaffa dilalui dengan tragis; ia dituduh sebagai pemberontak dan karenanya ia dipecat dari jabatannya sebagai sekretaris gubernur dan dihukum mati.

Ibn al-Muqaffa hidup sezaman dengan Imam Malik di Madinah (93-179 H). Akan tetapi, belum ditemukan literatur yang menginformasikan pertemuan mereka berdua. Mungkin ketidak-bertemuan mereka disebabkan oleh jarak yang jauh, Imam Malik di Madinah; sementara Ibn al-Muqaffa di Kirman (Irak);

³Cara mengangkat hakim/qadhi menurut teori ilmu fiqh, ada tiga bentuk: *Pertama: Tauliyah*, yaitu pengangkatan hakim/qadhi dilakukan oleh imam/kepala negara atau yang diberi kuasa. Imam di sini berfungsi sebagai *waliy al-amri*, yaitu pengemban amanat dan berwenang memerintah. Bila kekuasaan negara berada di tangan orang kafir sebutannya adalah *dzussyaukah* (penguasa yang nyata) dan *tauliyah* yang diberikan kepada seorang muslim adalah sah, seperti yang terjadi dengan Stb. 1882 No. 152 dalam pembentukan *priester raad* yang ketuanya diangkat oleh residen Belanda. *Kedua:* Bila tidak ada penguasa, maka masyarakat melalui *ahlul halli wa al-'qdi* (orang-orang yang dianggap mempunyai wewenang untuk memberhentikan atau mengangkat seseorang dari suatu jabatan), dapat mengangkat hakim/qadhi. *Ketiga:* Bila tidak ada hakim/qadhi, maka dua orang yang bersengketa dapat bertahkim kepada seseorang yang dipercaya, disebut *muhâkam* untuk bertindak sebagai hakim/qadhi dengan syarat kedua belah pihak sepakat untuk menaati keputusan yang diambil *muhâkam* tersebut serta maslahnya tidak menyangkut urusan pidana (had dan ta'zir). Lihat: Syekh Zainuddin bin Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*, Bandung: Reprod. Al-Ma'arif, t.th, hlm. 137. Lihat pula: Syekh Alwi bin Ahmad Al-Segaf, *Majmû'ah Sab'ah Kutub al-Mufidah al-Fawâid al-Makkiyah fî mâ Yahtâju Thulûbah al-Syâfi'iyah*, Bandung: Reprod. Al-Ma'arif, t.th, hlm. 54

ketika Ibn al-Muqaffa meninggal, usia Imam Malik sudah paruh baya, yaitu 43 tahun.

Kapasitas Ibn al-Muqaffa sebagai sekretaris Gubernur mengusulkan kepada khlifah Abu Ja'far al-Manshur untuk melakukan kodifikasi hukum melalui kitab *Risâlah al-Sahâbah* antara tahun 137-139 H, sedang khalifah al-Manshur meminta Imam Malik menyusun kitab (*al-Muwaththa'*) yang dimaksudkan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada tahun 163 H-164 H. Dengan demikian, lebih dahulu ibn al-Muqaffa mengemukakan ide *taqnîn* dari pada Imam Malik menyusun kitab *al-Muwaththa'* atas perintah khalifah al-Manshur. Versi lain mengatakan, bahwa Imam Malik sendiri yang berinisiatif menyusun kitab *al-Muwaththa'* tersebut.⁴

Setelah Ibn al-Muqaffa meninggal, sebagian mujtahid merasa perlu mempertimbangkan gagasan Ibn al-Muqaffa, terutama yang berkaitan dengan kodifikasi hukum. Hal yang sama juga dirasakan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Oleh karena itu, ketika menunaikan ibadah haji (tahun 163 H/760 M), kira-kira empat belas tahun setelah kematian Ibn al-Muqaffa, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dengan sengaja menemui Imam Malik guna memintanya menyusun sebuah kitab fikih dengan menetapkan hukum dari sumber-sumber primer, dengan mempertimbangkan prinsip kemudahan dalam melaksanakan hukum. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur meminta Imam Malik memilih pendapat yang representatif dan disepakati oleh para sahabat sehingga buku itu dapat dijadikan pegangan di seluruh negeri Islam. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memberi waktu bagi Imam Malik untuk menyusunnya selama satu tahun. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Imam Malik menyusun kitabnya yang terkenal, diberi nama *al-Muwaththa'*. Setelah selesai, kitab itu diserahkan kepada Muhammad ibn al-Mahdi, sebagai utusan khalifah. Namun upaya khalifah memberlakukan kitab *al-Muwaththa'* sebagai wujud kodifikasi hukum belum

⁴Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Jilid II, cet. I, hlm. 615

berhasil.⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa, ide *taqnîn* Ibn al-Muqaffa lebih dahulu muncul, kemudian baru kitab *al-Muwaththa'* lahir.

Menanggapi permintaan khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Imam Malik mengatakan: “Sesungguhnya penduduk Irak tidak setuju dengan pendapat saya, bahkan penduduk Irak menganggap bahwa pendapat saya tidak benar (salah)”. Jawaban ini mengisyaratkan akan keberatan Imam Malik untuk melakukan kodifikasi hukum.⁶

Khalifah Abu Ja'far al-Mansur menanggapi jawaban Imam Malik dengan mengatakan bahwa dia akan menjamin hukum yang sudah dikodifikasi nanti untuk diberlakukan di seluruh negeri; hakim yang tidak mau menerapkannya akan berhadapan dengan hukuman khalifah. Imam Malik berhasil menyempurnakan kitabnya pada zaman al-Mahdi (pengganti khalifah Abu Ja'far al-Mansur berikutnya). Khalifah Harun al-Rasyid pernah mengusulkan agar kitab ini dijadikan sebagai Undang-Undang resmi kehakiman negara, semua negeri sama dan ditempelkan di Ka'bah agar semua orang tahu, namun Imam Malik tidak menyetujuinya.⁷ Dengan demikian kodifikasi hukum belum berjalan pada saat itu.

Gagasan Ibn al-Muqaffa baru terealisasi pada tahun 1293 H/1876 M oleh Kerajaan Turki Usmani yang telah melakukan kodifikasi hukum yang kemudian dinamai *Majallât al-Ahkâm al-'Adliyyah* merupakan Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani yang diambil dari ketentuan-ketentuan Islam yang berasal dari mazhab Hanafi.⁸ Dalam *majallah* ini tidak ditemukan lagi perbedaan pendapat, sehingga produk hukum yang dihasilkan seragam. Kegiatan *taqnîn* ini meluas ke

⁵ *Ibid*, hlm. 961

⁶ Abd al-Wahab Khallaf, *Khulâshah Târikh al-Taysrî' al-Islâmî*, Wajidi Sayadi (Penyadur), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 90

⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Târikh al-Tasyrî' al-Islâmî*, Nadirsyah Hawari (Penerjemah), Jakarta: AMZAH, 2009, cet. I, hlm. 184

⁸ Muhammad Ibn Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyrî' fî al-Islâm*, alih bahasa *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1981, hlm. 71.

negara muslim lain, dimulai negara-negara di bawah kekuasaan Turki Usmani dan kemudian meluas ke seluruh negara muslim termasuk Indonesia.

Khalifah yang telah memvonis menjatuhkan hukuman mati (eksekusi) terhadapnya, ternyata masih memerlukan gagasannya. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur lah yang menuduh dia "bersekongkol" dengan pemberontak; karenanya ia dipecat dari jabatannya dan dihukum mati; dan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pula yang meminta Imam Malik⁹ untuk mengimplementasikan gagasan Ibn al-Muqaffa. Ini bukti bahwa gagasan atau pemikiran dia tetap dihargai, meskipun penggagasnya belum tentu dihargai.

Ibn al-Muqaffa tidak dikenal sebagai pakar fikih; karena dia tidak memiliki gagasan yang berupa penetapan hukum. Gagasannya yang sangat penting adalah ide *taqnîn* (kodifikasi hukum) demi menjamin kepastian hukum, merupakan gagasan yang terus hidup dan berkembang hingga dewasa ini.

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat legitimasi konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: *pertama*, alasan filosofis ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. *Kedua*, alasan sosiologis, perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, dan *ketiga*, alasan

⁹Imam Malik menulis kitab *al-Muwaththa'*, atas perintah Al-Manshur, dan dia bermaksud untuk meletakkan buku tersebut di pintu Ka'bah dan menyebarkannya ke seluruh daerah kekuasaan Bani Umaiah, dan menyuruh masyarakat Islam untuk merujuk pada kitab ini sebagai pegangan. Imam Malik menolak tawaran al-Manshur, dengan alasan para sahabat menyebar ke seluruh daerah. Mereka meriwayatkan hadis selain hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz yang dijadikan Imam Malik sebagai rujukan. Karenanya, Imam Malik menyarankan kepada al-Manshur biarkan saja mereka tetap seperti semula. Lihat: Abdul Fattah, *Târikh al-Tasyrî' al- Islâmîy*, Mesir: tp., 1981, cet. II, hlm. 270-271

yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25, dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.¹⁰

Dalam kenyataan yang lebih konkrit terdapat beberapa produk peraturan dan perUndang-Undangan yang secara formil maupun materil tegas memiliki muatan hukum Islam antara lain:

- a. UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama (kemudian diperbaharui UU No. 3 tahun 2006 dan UU no. 50 tahun 2009)
- b. UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (kemudian diperbaharui dengan UU no. 13 tahun 2008)
- c. UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan diperbaharui UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d. UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- e. UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah
- f. UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- g. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Berangkat dari latar-belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dianggap penting untuk memberikan penjelasan tentang ide *taqnîn* Ibn al-Muqaffa dan relevansinya dengan kodifikasi dan kepastian hukum Islam di Indonesia.

¹⁰Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU no. 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum di Indonesia*, dalam Mimbar Hukum no. 1 tahun V, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera Islam Depag RI, 4, hlm. 94-106

BAB II

IDE *TAQNÎN* DALAM SEJARAH HUKUM ISLAM

A. Dinamika Perkembangan Pemikiran Ibn Al-Muqaffa

1. Latar Belakang Pendidikan dan Kehidupan Ibn al-Muqaffa

Sebelum memeluk agama Islam, ibn al-Muqaffa dijuluki nama Abu Amr dan setelah masuk Islam diubah namanya menjadi Abu Muhammad Abdullah. Ayah Ibnu al-Muqaffa bernama al-Mubarak. Ketika Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi (41H/661 M-95 H/714 M) menjadi gubernur Bani Umayyah untuk Irak dan Iran, al-Mubarak memangku jabatan sebagai pemungut pajak untuk kedua daerah tersebut. Akan tetapi, al-Mubarak melakukan suatu kesalahan dengan menggelapkan sebagian hasil pungutan pajak tersebut, sehingga ia dijatuhi hukuman potong tangan. Sejak saat itu, al-Mubarak digelar *al-muqaffa* yang berarti “orang yang terpotong tangannya”. Gelar ini kemudian melekat pula nama anaknya, yaitu Abu Muhammad ibn al-Muqaffa.¹¹

Ibn al-Muqaffa dilahirkan di Shiraz, Persia, tahun 102 H/720 M dan wafat tahun 139 H/ 756 M dalam usia 37 tahun. Ia dilahirkan dari akulturasi dua kebudayaan. Ayahnya, Dazwih berdarah Persia dan ibunya berasal dari keturunan bangsa Arab. Dari sinilah ia banyak mewarisi dua kultur tersebut. Sehingga ia bertekad untuk menjembatani dua peradaban tersebut, yakni peradaban Persia dan Arab.¹²

Pada usia 15 tahun, ia pindah ke Basrah. Kota ini dipenuhi ulama, sastrawan, ahli syair, dan mutakallimin, Ibn al-Muqaffa melibatkan diri menuntut ilmu. Ibn al-Muqaffa tumbuh dewasa yang masyhur dengan era fasahah, manis dalam bertutur. Ibn al-Muqaffa selalu komunikasi dan interaksi

¹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, hlm. 615.

¹² Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Jilid III, cet. I, hlm. 960.

dengan orang Arab, para amir yang fasih dengan bahasa Arab, dan dari merekalah beliau transfer bahasa Arab yang standar dan berkualitas.¹³

Ibn al-Muqaffa belajar bahasa Arab kepada gurunya bernama 'Isa ibn 'Ali, Abu al-Jamus Tsaur ibn Yazid dan Abd al-Hamid al-Katib (w.132 H/750 M).¹⁴ Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Yazid ibn Umar ibn Abi Hubairah, Daud ibn Umar ibn Abi Hubairah, dan Khuwailid seorang pemimpin di Sabur yang masih beragama Masehi.¹⁵

Sahabat-sahabat Ibn al-Muqaffa antara lain adalah Abd al-Hamid al-Katib (beliau adalah guru sekaligus sahabat Ibn al-Muqaffa), Ibn Ramin Ma'an ibn Zaidah, Rouh ibn Hatim, Walibah ibn al-Hubbab, Muthi' ibn Iyas, Munqidz ibn Abd al-Rahman al-Hilali, Hafsh ibn Abi Wardah, Yunus ibn Abi Farwah, Hammad ibn 'Ajrad, 'Ali ibn al-Khalil, Hammad ibn Abi Laila al-Riwayah, ibn Zabarqan, 'Ammarah ibn Hamzah, Yazid ibn al-Faidh, Jamil ibn Mahfuzh, Basysyar, al-Mar'ats, Aban al-Lahiqi.¹⁶

Di samping bahasa Arab, Ibn al-Muqaffa juga menguasai bahasa Suryani, Pahlevi, Sanskerta, India dan Yunani. Ibn al-Muqaffa banyak mempelajari sejarah dan Peradaban Persia Lama, juga gemar membaca naskah-naskah lama dengan kemampuannya tersebut. Ibn al-Muqaffa merupakan orang pertama kali melakukan penerjemahan karya-karya sastra Persia dan India ke dalam bahasa Arab¹⁷. Penerjemahan¹⁸ itu mengakibatkan dua hal yang sangat penting: yaitu

¹³Abdul Latif Hamzah, *Ibn al-Muqaffa*, Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1965, cet. III, hlm. 38

¹⁴Umar ibn Qayyinah, *Al-Ru'yah al-Fikriyyah fi al-Hâkim wa al-Ra'iyyah Lada Ibn al-Muqaffa' wa Ibn al-'Annabi wa al-Kawakibi*, Yordan-Aman: Dâr Usâmah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000, hlm., hlm. 29

¹⁵Abdul Latif Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 39-40

¹⁶*Ibid*, hlm. 52-53

¹⁷Sebagai wujud nyatanya, Ibn al-Muqaffa menerjemahkan Buku *Kalilah wa Dimnah* dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Adapun aslinya ditulis menggunakan bahasa Sanskerta. Buku yang berisi tentang pelajaran-pelajaran hidup melalui cerita hewan (fabel) ini, baik dalam bahasa aslinya maupun bahasa Persia telah hilang, meskipun sebagiannya masih termaktub